

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil estimasi yang telah dilakukan menggunakan analisis *Least Squared* melalui Eviews terhadap variabel jumlah pengangguran, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), pertumbuhan ekonomi, dan ketahanan pangan terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jumlah Pengangguran mampu meningkatkan jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif-signifikan jumlah pengangguran terhadap jumlah kemiskinan. Yang bermakna, semakin tinggi akumulasi pengangguran, maka jumlah kemiskinan juga cenderung meningkat. Kondisi ini terjadi karena pengangguran menyebabkan hilangnya pendapatan masyarakat sehingga daya beli menurun dan kebutuhan dasar sulit terpenuhi. Temuan ini selaras dengan teori Okun's Law yang menegaskan bahwa pengangguran merupakan salah satu faktor utama penyebab meningkatnya jumlah kemiskinan, khususnya di wilayah dengan kesempatan kerja yang terbatas.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) belum mampu menurunkan jumlah kemiskinan secara efektif di Provinsi Jawa Tengah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial TPAK memiliki hubungan positif terhadap jumlah kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingginya partisipasi angkatan kerja tidak selalu diikuti oleh tersedianya lapangan kerja yang layak. Banyaknya masyarakat yang masuk

dalam angkatan kerja justru berpotensi meningkatkan jumlah kemiskinan apabila kesempatan kerja yang tersedia didominasi sektor informal dengan pendapatan rendah. Dengan demikian, tingginya TPAK belum cukup efektif menekan jumlah kemiskinan tanpa didukung kualitas pekerjaan yang memadai.

3. Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu menurunkan jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi justru memiliki pengaruh positif terhadap tingkat jumlah kemiskinan. Artinya, peningkatan pertumbuhan ekonomi belum bersifat inklusif dan belum dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh dominasi sektor padat modal yang kurang menyerap tenaga kerja miskin serta ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan tidak efektif dalam menekan jumlah kemiskinan.

4. Ketahanan Pangan berpengaruh tidak signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial ketahanan pangan yang diukur melalui produksi padi (GKG) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap jumlah kemiskinan. Artinya, peningkatan produksi pangan yang tinggi belum secara otomatis menurunkan angka jumlah kemiskinan. Hal ini terjadi karena distribusi pangan yang belum merata serta keterjangkauan harga yang masih menjadi kendala bagi masyarakat miskin.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, tetapi juga akses dan daya beli masyarakat terhadap pangan tersebut.

5. Keseluruhan Variabel Memiliki Pengaruh Signifikan Terhadap Jumlah Kemiskinan

Secara simultan, Pengangguran, TPAK, Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketahanan Pangan bersama-sama berpengaruh tidak signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial secara bersamaan. Oleh karena itu, penanggulangan jumlah kemiskinan membutuhkan kebijakan yang terintegrasi dan tidak hanya berfokus pada satu aspek saja.

5.2 Saran

Merujuk pada hasil serta sintesis yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa perbaikan yang dapat dilakukan bagi pengkaji selanjutnya sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat memperkuat kebijakan penciptaan lapangan kerja baru, khususnya pada sektor-sektor padat karya, agar pengangguran dapat ditekan dan masyarakat memiliki sumber pendapatan yang stabil. Program pelatihan keterampilan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja juga perlu diperluas agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
2. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas kesempatan kerja, sehingga tingginya TPAK dapat benar-benar diikuti dengan pekerjaan layak dan

produktif. Dengan demikian, masyarakat yang aktif dalam angkatan kerja tidak terjebak dalam pekerjaan informal berupah rendah yang berpotensi mempertahankan jumlah kemiskinan.

3. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah perlu diarahkan menjadi lebih inklusif, melalui pemerataan pembangunan antarwilayah, penguatan UMKM, serta peningkatan akses masyarakat miskin terhadap sektor produktif. Dengan begitu, manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih merata.
4. Kebijakan ketahanan pangan tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga harus memastikan distribusi pangan yang merata, stabilisasi harga, serta akses pangan yang terjangkau bagi rumah tangga miskin. Program subsidi pangan dan penguatan kelembagaan petani dapat menjadi strategi penting.
5. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain, seperti investasi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia (IPM), atau pendidikan agar hasil penelitian lebih komprehensif. Selain itu, penggunaan data panel antar kabupaten/kota di Jawa Tengah juga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam terkait dinamika jumlah kemiskinan di tingkat lokal.